

PEMERATAAN SOSIAL DAN USAHA REBOISASI
DI EMPAT LOKASI PERHUTANAN SOSIAL DI JAWA

Oleh :

William Sunderlin*)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Beberapa tahun yang lalu, pemerataan sosial dijabarkan sebagai tujuan dalam Program Perhutanan Sosial di Jawa. Pada tahun 1986, direksi Perum Perhutani mengeluarkan surat kepada kantor-kantor bawahannya yang mengusulkan peningkatan dalam keikutsertaan penduduk di wilayah proyek perhutanan sosial. Kelompok masyarakat yang dituju adalah mereka yang mempunyai 1/4 hektar atau kurang lahan milik. Dalam penerbitan Perum Perhutani Pedoman Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial (1988:7) disebut bahwa "calon anggota diprioritaskan dari masyarakat desa sekitar hutan dengan kriteria : tingkat pendapatan rendah, lahan garapan yang dimiliki tidak memadai/tidak memiliki lahan pertanian, sanggup bekerja di hutan, memiliki ketrampilan khusus, dan lain-lain sesuai perjanjian".

Peraturan ini sesuai dengan tujuan pemerataan sosial yang sudah lama dinyatakan dalam kebijaksanaan pembangunan di Indonesia. Bahkan peraturan ini dapat menjawab berbagai masalah yang pernah dialami dalam usaha reboisasi di Jawa. Misalnya, menurut penelitian yang dilaksanakan di beberapa proyek tumpang sari pada tahun 1985 (Peluso, 1986 : 32-33), kadang-kadang petani kaya lebih berhasil dalam perolehan andil dibandingkan dengan petani miskin.

Masalah dan Tujuan Penelitian

Dua pertanyaan inti dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah perbedaan status sosio-ekonomi rumahtangga para peserta dalam proyek perhutanan sosial dan status sosio-ekonomi rumahtangga para bukan-peserta di kawasan proyek ? (2) bagaimana hubungan antara status sosio-ekonomi peserta dan bukan-peserta di satu pihak dan pencapaian tujuan-tujuan Program Perhutanan Sosial (seperti keberhasilan usaha reboisasi dan peningkatan taraf hidup) di pihak lain. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini mungkin dapat membantu menjelaskan kemajuan dalam usaha memprioritaskan orang-orang miskin di Program Perhutanan Sosial.

*) Mahasiswa S₃ Cornell University Amerika Serikat.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di empat lokasi perhutanan sosial perluasan yang dibuka pada tahun 1987. Dua lokasi adalah lokasi jati (lokasi B dan C) dan dua adalah lokasi damar (lokasi A dan D). Dalam setiap kategori jenis pohon, ada satu lokasi yang mempunyai lahan (yang secara relatif) lebih baik dan satu lokasi yang mempunyai lahan (yang secara relatif) kurang baik untuk pertanian. Dalam kategori lahan baik ada lokasi jati di Jawa Tengah (lokasi B) dan lokasi damar di Jawa Timur (lokasi D). Dalam kategori lahan kurang baik ada lokasi jati di Jawa Tengah (lokasi C) dan lokasi damar di Jawa Barat (lokasi A).

Diasumsikan bahwa dengan membandingkan lokasi-lokasi perhutanan sosial atas dasar keadaan lahannya, maka kita dapat menemukan pemahaman terhadap masalah pemerataan sosial. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa kemungkinan hanya petani yang miskinlah yang akan masuk ke program yang berlangsung pada lahan kurang baik, sedangkan baik petani miskin maupun petani kaya akan coba masuk ke proyek yang berlahan baik.

Penelitian ini dilaksanakan antara bulan Mei dan September 1989 oleh empat asisten penelitian. Untuk setiap lokasi yang diteliti, ada seorang asisten penelitian.

Metoda Pengambilan Contoh dan Jenis Data

Karena kami tidak mungkin mengumpulkan data mengenai semua rumahtangga dalam semua desa yang relevan di kawasan proyek, kami menggunakan dua tingkat konsentrasi.

"Daerah I" adalah bagian tertentu dari suatu desa, seluruh desa, atau beberapa desa yang letaknya paling dekat dengan lokasi perhutanan sosial yang diteliti. "Daerah II" adalah bagian tertentu dari suatu desa, seluruh desa, atau beberapa desa yang letaknya paling jauh dari lokasi perhutanan sosial yang diteliti. Penelitian ini memberikan perhatian yang lebih besar kepada "Daerah I".

Semua rumahtangga "Daerah I" disensus dan semua rumahtangga peserta diwawancarai dengan kuesioner; sebagian rumahtangga bukan-peserta di "Daerah I" dipilih secara acak dan diwawancarai dengan kuesioner. Di "Daerah II", tujuan kita adalah untuk mengadakan sensus dan wawancara dengan kuesioner hanya kepada sampel rumahtangga peserta dan bukan-peserta. Ada variasi besar antara sampel-sampel di "daerah II" di empat lokasi karena perbedaan masing-masing tempat.

Melalui sensus dan kuesioner kita mengumpulkan berbagai macam data seperti data dasar rumahtangga: kekayaan, penghasilan,

pendapatan dan pengeluaran rumahtangga; curahan waktu dan pola kerja; dan informasi yang bersangkutan dengan proses pemilihan peserta. Wawancara kualitatif yang diadakan dengan "key informants" digunakan untuk menilai proses seleksi peserta dan distribusi andil. Yang dipilih sebagai "key informants" adalah bukan-peserta yang pernah ingin masuk ke proyek, pejabat Perum Perhutani, pemrakarsa dan kepala desa.

Metode Analisis Data

Sebagian besar data kuantitatif masih belum dimasukkan ke komputer. Oleh karena itu, sebagian besar analisis data masih belum dikerjakan. Bahkan, pekerjaan lapangan masih belum selesai. Saya akan kembali ke lokasi untuk mendapatkan sisa data. Kemudian saya akan melaksanakan penelitian "rapid rural appraisal" (Penelitian Penilaian Pedesaan dalam Waktu Singkat) di tiga puluh lokasi. Penelitian "rapid rural appraisal" ini akan diadakan untuk mengetahui sejauh mana penemuan-penemuan selama ini juga berlaku di lokasi lain.

Setelah pekerjaan lapangan dan pemasukan data sudah selesai, saya akan melakukan analisis statistik untuk data kuantitatif dan mengadakan intepretasi terhadap hasil kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karena hasil pekerjaan belum selesai dan sebagian analisis data belum dikerjakan saya akan menyampaikan hasil penelitian untuk bidang-bidang yang tertentu saja, yaitu (1) proses seleksi peserta yang dilaksanakan di tiap lokasi (2) cara pembagian andil di lokasi dan (3) masalah-masalah yang akan dihadapi pada masa mendatang.

Proses Seleksi Peserta

Penemuan-penemuan pokok dalam bidang seleksi peserta adalah sebagai berikut:

1. Di dua lokasi yang mempunyai lahan kualitas baik (lokasi jati B di Jawa Tengah dan lokasi damar D di Jawa Timur), ada petani kaya yang dapat masuk ke proyek, meskipun ada petani miskin yang berminat untuk masuk ke proyek tetapi tidak berhasil menjadi anggota.
2. Di dua lokasi yang mempunyai lahan yang secara relatif kurang baik (lokasi damar A di Jawa Barat dan lokasi jati C di Jawa Tengah), jumlah petani yang berminat untuk masuk kira-kira seimbang dengan luas lahan yang tersedia. Dengan demikian, tidak perlu diadakan seleksi terhadap peminat, sehingga baik yang kaya maupun ayng miskin diterima.

3. Di salah satu lokasi (lokasi B) kebijaksanaan untuk melibatkan petani miskin diabaikan. Kemampuan untuk menyewa lahan dari oknum setempat merupakan persyaratan utama untuk masuk ke proyek.

Hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan 1986 yang bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan petani-petani miskin adalah sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan tidak layak untuk dilaksanakan bila penduduk sedikit (lokasi A dan lokasi C);
2. Kebijaksanaan baru yang menuju pemerataan sosial tidak dilaksanakan karena keikutsertaan peserta telah dijanjikan terlebih dahulu pada tahun sebelumnya (sebelum kebijaksanaan baru diturunkan) (lokasi B);
3. Ketidakcocokan kebijaksanaan dengan tujuan oknum setempat (lokasi D);
4. Kebijaksanaan dimaksudkan dan dianggap sebagai saran daripada sebagai perintah (di semua lokasi);
5. Adanya larangan menjadi peserta bagi mereka yang pernah melanggar peraturan-peraturan Perum Perhutani. Mungkin yang pernah melanggar adalah justru petani-petani miskin (lokasi B);
6. Adanya hambatan terhadap keterlibatan petani-petani miskin, misalnya karena pola dan jam kerja buruh tani kadang-kadang tidak cocok dengan pola dan jam kerja di proyek Perhutanan Sosial (terutama lokasi A).

Pembagian Andil (Alokasi Lahan PS) di Proyek-Proyek

Ada variasi dalam sistem-sistem yang digunakan untuk membagi andil. Meskipun sistem lotere dianggap sebagai sistem yang paling baik untuk menjamin pembagian yang adil, sistem itu hanya dilaksanakan di satu lokasi-lokasi B di Jawa Tengah. Di lokasi lain ada berbagai cara dalam pembagian andil, yaitu:

1. Di lokasi C, kebanyakan anggota mendapatkan andil mereka atas dasar peralihan keanggotaan dari proyek tumpangsari yang terlebih dahulu di lokasi yang sama;
2. Anggota selebihnya di lokasi C dan semua anggota di lokasi A mendapatkan andil mereka berdasarkan prinsip bahwa mereka yang datang terlebih dahulu mendapatkan andil lebih dulu;
3. Di lokasi D lotere tidak digunakan karena ada sistem penyewaan andil yang menentukan distribusi lahan di lokasi.

Pembagian andil pada saat pembukaan lokasi bukan satu-satunya cara pembagian lahan. Ada tiga cara pembagian lahan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. "Pembagian resmi awal": pembagian resmi yang dilaksanakan pada pembukaan proyek dan dengan bimbingan dan pengawasan Perum Perhutani;
2. "Pembagian resmi yang disesuaikan": pembagian resmi atas dasar persetujuan anggota untuk menggeser batas-batas andil ; atau pembagian andil karena ada tambahan (atau penggantian) penggarap di dalam satu keluarga;
3. "Pembagian non-resmi": pembagian dimana sebagian atau seluruh andil dipinjamkan atau disewakan kepada orang yang tidak terdaftar sebagai anggota.

Variasi Sosio-ekonomi dan Masalah-Masalah Pemerataan Sosial pada Masa Mendatang

Ada variasi besar dalam status sosio-ekonomi rumahtangga-rumahtangga di lokasi-lokasi yang diteliti. Misalnya para peserta terdiri dari petani dari semua tingkat pemilikan lahan. Juga, ada variasi dalam status sosio-ekonomi di antara keempat lokasi yang diteliti. Variasi sosio-ekonomi ini adalah sebagai berikut:

1. Variasi dalam ketergantungan terhadap lahan hutan sebagai sumber pendapatan utama. Misalnya, di lokasi A hanya 8 persen dari para peserta tergantung pada lahan hutan sebagai sumber pendapatan utama, sedangkan di lokasi B 68 persen dari para peserta tergantung terutama pada lahan hutan;
2. Variasi dalam penggunaan lahan hutan, misalnya mereka yang menggunakan lahan hutan terutama sebagai sumber pangan (di lokasi A dan C) dan menggunakannya terutama sebagai sumber pendapatan tunai di lokasi B dan D).

Jenis-jenis variasi ini perlu dipertimbangkan dalam merencanakan perubahan-perubahan dalam program perhutanan sosial pada masa mendatang. Pada masa mendatang, di banyak lokasi perhutanan sosial, pertumbuhan tanaman pokok akan menutupi lahan yang sekarang dapat digarap. Mungkin sekali pendapatan dilokasi-lokasi tersebut akan menurun. Akibat perubahan itu, hal-hal berikut mungkin akan muncul:

1. Mereka yang kaya mungkin akan terus bertahan di proyek, sedangkan yang miskin kemungkinan akan meninggalkan proyek;
2. Mereka yang tidak terlalu tergantung pada lahan hutan mungkin akan meninggalkan proyek, sedangkan mereka yang sangat tergantung pada lahan proyek kemungkinan akan terus bertahan sebagai pesanggem;
3. Mereka yang menanam untuk konsumsi sendiri mungkin akan mengalami kesulitan bila ada perubahan ke tanaman pengganti yang ditujukan untuk dipasarkan.

Pada masa mendatang, di sebagian lokasi akan ada kekurangan lahan hutan yang akan dibuka pada saat lokasi yang ada di sebelahnya tajuk tanaman pokoknya telah menutup. Ketersediaan lahan hutan untuk dibuka penting sekali sebagai dorongan bagi anggota untuk terus memelihara tanaman pokok. Apabila ada kekurangan lahan, hal-hal yang berikut mungkin akan terjadi:

1. Mungkin mereka yang kaya akan cenderung kehilangan semangat untuk memelihara tanaman pokok;
2. Mungkin mereka yang kurang tergantung pada lahan hutan akan sanggup untuk melalaikan pemeliharaan tanaman pokok.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana diharapkan dalam penelitian ini, persoalan pemerataan sosial lebih nampak di lokasi yang berlahan baik dibanding dengan lokasi yang berlahan kurang baik. Di lokasi yang berlahan kurang baik (lokasi A dan C) jumlah peminat tidak melebihi (atau paling tidak, tidak jauh melebihi) luasan lahan yang tersedia. Di lokasi yang berlahan lebih baik (lokasi B dan D) jumlah peminta melebihi luasan lahan yang tersedia.

Di dua lokasi yang berlahan kurang baik, peraturan yang menuju ke arah pemerataan sosial tidak dilaksanakan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Sedangkan, peraturan itu tidak diselenggarakan di dua lokasi yang berlahan baik, meskipun sesungguhnya layak untuk diselenggarakan.

Dalam hal distribusi andil, sistem lotere digunakan di satu lokasi saja, meskipun sistem itu bermanfaat untuk menghindarkan persoalan iri hati antar peserta. Ditemukan bahwa ada pergantian dan penambahan peserta dan pergeseran batas-batas andil sesudah saat pembukaan proyek.

Berdasarkan hasil penelitian sementara, kami mempunyai hipotesa bahwa menghadapi tantangan pada masa depan, seperti penutupan tajuk tanaman pokok dan kekurangan pembukaan baru, akan ada variasi besar antar peserta dengan latar belakang sosio-ekonomi yang berbeda.

Sebagai penutup makalah ini kami mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dilaksanakannya penelitian di lebih banyak lokasi untuk mengetahui sejauh mana diperlukannya petani miskin yang layak untuk diterima tetapi ternyata tidak berhasil diterima;
2. Diperlukan kewaspadaan terhadap kasus penyewaan lahan seperti yang terjadi di lokasi D;
3. Dalam melaksanakan penelitian dan menanamkan sikap waspada yang dianjurkan di atas sebaiknya proyek-proyek yang berlahan subur diutamakan;

4. Dalam melaksanakan distribusi andil sebaiknya cara lotere selalu digunakan meskipun kelihatannya tidak perlu;
5. Terjadinya subdivisi andil dan pembagian andil "non-resmi" sebaiknya dibahas lebih lanjut. Bila hal-hal itu terjadi secara berlebihan mungkin akan berakibat buruk terhadap pembinaan KTH dan prestasi proyek pada umumnya;
6. Dalam merencanakan perubahan kebijaksanaan untuk menghadapi masalah-masalah pada masa mendatang (misalnya penutupan tajuk tanaman pokok dan kekurangan pembukaan baru), sebaiknya variasi sosio-ekonomi di dalam dan di antara lokasi-lokasi proyek diper-timbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peluso, Nancy. 1986. "Report on Sosial Forestry Field Research in West and Central Java". Prepared for the State Forestry Corporation and the Ford Foundation. April 22.
- Perum Perhutani. 1988. Pedoman Pelaksanaan Perhutanan Sosial. Jakarta. Juli.

DISKUSI SIDANG SEMINAR KE SATU

Penanya : Jejen

1. Pelatihan Perhutanan Sosial bukan hanya pada tingkat Asper, melainkan juga sudah pada tingkat KRPH, Mandor dan KTKU bahkan sampai tingkat Administratur. Yang lebih penting disini bagaimana peranan aparat tersebut agar dapat mendukung Program PS. Perlu mekanisme yang jelas ?

Jawab : Fadholi Hernanto

1. Setuju; Memang seharusnya demikian untuk penyebarluasan wawasan dan pengertian. Untuk membuat persamaan bahasa dan pengertian dari perangkat terbawah sampai ke atas. Ini merupakan sosialisasi sekaligus penerangan untuk sasaran. Tetapi pada waktu penelitian, itu yang terjadi, demikian di Cikiong. Apa yang dapat ditarik dari pertanyaan anda dan kenyataan di lapang, tampaknya masih perlu waktu dan kerja keras untuk memasyarakatkannya.

Pembagian tugas dan wewenang yang jelas disertai upaya menggerakkan swadaya KTH adalah merupakan mekanisme yang dapat dicobakan.

Penanya : Mas'ud Junus

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi permintaan kredit oleh petani ?

2. Bagaimana cara untuk menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut betul-betul berpengaruh ?

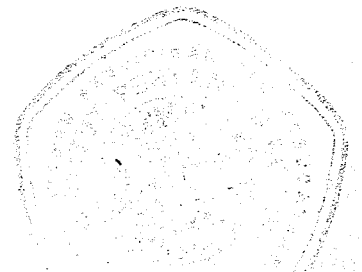
3. Mana di antara faktor-faktor tersebut yang paling berpengaruh

4. Apakah pernah dipikirkan untuk menggunakan analisis komponen utama untuk menjawab pertanyaan butir tiga di atas ?

Jawab : Fadholi Hernanto

2. Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan kredit oleh KTH, antara lain faktor ekonomi atau peubah proksinya (turunannya), faktor sosial dan faktor di luar petani. Untuk menyimpulkan dari uji model yang digunakan dan yang paling berpengaruh adalah faktor lahan dan jumlah keluarga.

Untuk penelitian ini tidak menggunakan analisis komponen utama, tetapi model rumahtangga seperti yang telah disajikan.



Penanya : Perhutani

1. Unit garapan anggota KTH secara bertahap menuju pembagian 5ha
2. Kemplongan 20 % jadi dari unit garapan 5 ha, yang jadi komplangan 1 ha. Demplot dibuat Perhutani.
3. Pola kredit, dicari kelembagaan yang tepat, tapi sumber dana dari Perhutani (untuk pupuk dan bibit ikan/udang).
4. Empang parit intensif sesuai kebijaksanaan Gubernur Jabar akan ditutup dalam waktu tiga tahun sejak tahun 1989.

Jawab : Fadholi Hernanto

3. Untuk KTH di kawasan hutan mangrove benar menuju 5 ha, tetapi ini tidak menyelamatkan hutan mangrove. Karena itu peneliti menganjurkan cukup 2 ha dengan rekayasa usahatani yang berdimensi banyak, dan secara ekonomis layak.

Benar untuk pelaksanaan pemberian kredit kepada petani perlu di kembangkan kelembagaan yang tepat. KTH adalah organisasi petani untuk hal-hal politis dan diharapkan menjadi bagian dari HKTI atau HSNI. Tetapi koperasi KTH itulah wadah yang tepat untuk penyaluran kredit.

Kebijakan itu dibuat untuk memecahkan persoalan dan seyogyanya dipertimbangkan untuk itu. Mereka dapat dihalau secara paksa dan ini tidak menyelesaikan persoalan. Bagaimana mangrove selamat, rakyat tidak melarat, pembangunan jalan terus.

Penanya : Anonim

1. Bagaimana gambaran KTH (sebagai organisasi atau kelompok yang tumbuh dari masyarakat atau petani hutan sendiri), dan sejauh mana efektifitasnya karena pada dasarnya KTH ini sebagai salah satu alternatif penyediaan kredit bagi anggota.
2. Sepengetahuan saya di kawasan hutan ada masyarakat luar/pendatang dan mereka tinggal di dalam hutan mangrove dan pada umumnya mereka ini miskin, tetapi keberadaannya dapat menimbulkan kerusakan hutan. bagaimana mengatasi haal ini ? apakah mereka dapat pula menerima kredit seperti yang anda temukan dalam penelitian.

Jawab : Fadholi Hernanto

4. KTH dibentuk atas prakarsa dari atas (Perum Perhutani) dan bukan tumbuh dari bawah, bukan swadaya, menurut kebutuhan kelompok. Prakarsa ini tidak jelek dan justru baik sebagai proses penyadaran dan penataan. Penyadaran bahwa merka menggarap lahan hutan milik negara, bukan milik pribadi mereka. Penyadaran bahwa

yang menggarap itu yang anggota KTH bukan penyerobot yang tinggal di kota. Karena itu perlu ditata.

Keadaan kelompok sekarang cukup memadai, tetapi untuk ke depan perlu ditata sesuai tujuan pelestarian hutan. Berdasar pada hasil penelitian dan pengamatan, penataan ini harus menyeluruh, termasuk mereka seperti yang anda maksudkan. Jadi kepada mereka dapat diberikan kredit, jika memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan disepakati.

Penanya : Suwarno

1. Bagaimana gambaran umum mengenai kemajuan tanaman hutan di lokasi PS tersebut ?

Jawab : Fadholi Hernanto

5. Kalau mau jujur, hutan mangrove di daerah penelitian ini rusak, gawat. Tetapi bukan berarti tidak ada usaha. Usaha ini telah mulai menampakkan hasilnya dan jika model yang saya anjurkan dilaksanakan, dalam 5 tahun yang akan datang insya Allah akan lebih dari 50 % hutan lestari kembali.

Penanya : Teguh Purwanto

1. Masalah utama pada hutan mangrove adalah tidak seimbang nya "pemerataan sosial". Bagaimana penerapan "Pola kredit" terhadap para "petani kaya" dari luar daerah (Jakarta, dan sebagainya) ?

Jawab : Fadholi Hernanto

6. Seperti jawaban terdahulu, ada kriteria siapa yang boleh, ditolerir menggarap hutan. Mereka yang masuk kriteria ini yang diberi kredit. Petani kaya yang menggarap ini yang perlu dibenahi; ada pendekatan agar mereka bersedia melepaskan lahan hutan yang bukan hak mereka menjadi milik negara kembali. Kalau perlu dapat diberikan ganti garapan atau investasi yang telah dikeluarkan. Pemerintah telah memiliki aturannya. Berikan alternatif bagi penggarap sekarang.

Penanya : Marwoto

1. Apa yang dimaksud dengan besarnya uang sewa untuk tiap ha lahan yang digarap ? (Perhutani tidak pungut sewa untuk garapan tersebut).

2. Biasanya uang kontrak dari Perhutani dijadikan modal awal untuk koperasi KTH.

Jawab : Fadholi Hernanto

7. Betul, itu istilah yang digunakan oleh penggarap dan jika

Perhutani merasa tidak menyewakan, itu perbedaan istilah yang artinya sama atau mendekati sama. Karena itu sewa saya tulis dalam tanda petik ("sewa").

Saya memang menganjurkan demikian dari "sewa" itu yang dijadikan modal. Di Cikiong menurut perhitungan kasar saja, setahun tidak kurang dari Rp 140 000 000,-.

Penanya : Tutut Sunarminto

1. Alasan-alasan positif apa yang menyebabkan Peneliti "merekomendasikan" bahwa "kredit" layak diberikan pada petani pengguna hutan Cikiong ?

2. Dalam hal "pengelompokan petani" dan penentuan petani yang layak atau tidak menerima kredit ataupun berbagai macam tunggakan kredit masyarakat, baik KUT maupun non-KUT (seperti KPR BTN), bagaimanakah prospek kredit kehutanan ini ?

Jawab : Fadholi Hernanto

8. Alasan utama, petani memerlukan; Alasan kedua untuk mengikat dan mengendalikan. Menurut perhitungan yang saya lakukan kredit layak. Ada prospek pelestarian hutan dan sekaligus pendapatan petani.

Seperti telah saya jawab terdahulu, saya tegaskan lagi perlu relokasi KTH yang sekarang.

Penanya : Budi Kunchahyo

1. Apakah kredit sebaiknya diberikan kepada petani secara bersama-sama sebagai satu unit usaha, atau diberikan pada masing-masing petani sebagai individu ?

2. Apakah menurut pendapat saudara, peranan Pemerintah Daerah dalam membina Perhutanan Sosial di tempat penelitian tersebut kurang baik sehingga banyak terjadi garapan-garapan liar oleh orang-orang yang tidak semestinya ?

Jawab : Fadholi Hernanto

9. Kredit diberikan kepada dan melalui kelompok untuk pribadi-pribadi, dan mereka secara pribadi yang bertanggung jawab untuk mengembalikan kredit itu bersama di dalam kelompok. Sumber dana dari Perhutani. Hal ini berarti memecahkan masalah secara mandiri.

Tidak hanya Pemerintah Daerah, tetapi juga pemahaman seluruh perangkat dan masyarakat.

Penanya : Teguh Purwanto

1. Apa batasan "kaya" dan "miskin" yang saudara pakai ?
2. Terkadang sulit untuk memilih peserta program seluruhnya termasuk kategori "miskin", dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Proyek bersifat "awal" (baru pertama kali) sehingga ada kecenderungan memilih sebagian petani "kaya/mampu" ikut program sebagai "penggerak" untuk mendukung keberhasilan program. Sehingga pada program-program selanjutnya petani kurang mampu dapat lebih tertarik dan terlibat lebih banyak.

b. Pada masyarakat desa biasanya terdapat kelompok "hubungan keluarga" yang sudah mempunyai komunikasi yang lebih erat antar anggotanya. Berdasarkan ini maka ada kecenderungan memilih "kelompok keluarga" ini sebagai peserta program, tanpa melihat anggota mampu atau tidak. Sehingga diharapkan program dapat berhasil engan Kelompok Tani Hutan yang kompak/kuat. Bagaimana tanggapan saudara ?

Jawab : William Sunderlin

1. Tingkat pemilikan lahan dipakai dulu sebagai perkiraan awal siapa yang "kaya" dan siapa yang "miskin". Kemudian nanti sistem analisa "garis kemiskinan" digunakan untuk menentukan siapa yang "kaya" dan siapa yang "miskin".

Sebetulnya, sebagaimana saudara menjelaskan, mungkin istilah-istilah "lebih mampu" dan "kurang mampu" lebih layak dibandingkan dengan "kaya" dan "miskin".

2. Saya setuju bahwa kadang-kadang petani-petani yang lebih mampu layak untuk diterima sebagai anggota dalam proyek-proyek Perhutanan Sosial. Akan tetapi, saya menganjurkan kecermatan dalam penerimaan petani yang mampu. Misalnya, dalam situasi dimana petani teladan dianggap perlu, sebaiknya para pemrakarsa mempertimbangkan hal-hal yang berikut: (1) kemungkinan besar suatu proyek Perhutanan Sosial dapat berhasil dengan keikutsertaan "petani teladan" dalam jumlah yang kecil; petani yang selebihnya dapat mengikuti contoh-contoh petani "teladan"; (2) kadang-kadang terdapat "petani teladan" yang bukan petani yang lebih mampu melainkan petani yang kurang mampu.

Dalam situasi "kelompok keluarga" yang disebut saudara, sebaiknya kelompok itu tidak akan berakibat buruk terhadap tujuan pemerataan sosial. Pertanyaan-pertanyaan yang berikut sebaiknya dipertimbangkan: (1) Apakah jelas bahwa Kelompok Tani Hutan yang meliputi petani-petani yang bukan anggota "kelompok hubungan keluarga" tidak akan berhasil ? (mungkin hal ini dapat dinilai menurut ketersediaan pembinaan dari pihak Perum Perhutani). (2) Apakah "kelompok hubungan keluarga" itu layak untuk diterima seluruhnya bila dinilai dari segi pemerataan sosial ? Apabila tidak, sebaiknya menerima hanya sebagian keluarga itu yang kurang

mampu. Mungkin mereka sendiri dapat menyediakan kekuatan yang cukup dalam hal organisasi Kelompok Tani Hutan.

Penanya : Suwarno, Perhutani Unit I, Jawa Tengah

1. Pelaksanaan pembagian andil bagi petani miskin akan mengalami kesulitan, karena hasil bekerja hari ini dimakan pada hari itu juga, padahal di lokasi PS untuk menghasilkan dibutuhkan waktu lama. Yang perlu diberi batasan disini yaitu mengenai petani miskin itu sendiri, saya mohon supaya dijelaskan tolok ukur "petani miskin".

2. Saran-saran yang Saudara ajukan dalam pembagian andil masih terlalu teoritis dan hal tersebut akan mengalami kesulitan apabila dilaksanakan di lapangan; saya mohon adanya sedikit perubahan tentang saran pembagian andil yang sekiranya mampu dilakukan oleh seorang mandor.

Jawab : William Sunderlin

1. Saya kira sebaiknya patokan "kurang dari 1/4 hektar lahan milik" digunakan sebagai tolok ukur "petani miskin", akan tetapi semestinya digunakan secara luwes. Apabila digunakan secara kaku, pasti ada persoalan: lahan seluas 1/4 hektar tidak sama dimana-mana dan tidak sama untuk semua rumah tangga; lagi pula ada petani yang "lebih mampu" yang mempunyai lebih sedikit dari 1/4 hektar lahan milik. Pokoknya, para pemrakarsa kemungkinan besar mengetahui siapakah yang kurang mampu dan siapakah yang lebih mampu. (Kekurangan dalam proses seleksi peserta adalah justru bahwa mereka tidak menggunakan pengetahuan itu).

Benar, ada petani yang tidak dapat ikut karena tidak dapat menunggu lama untuk penghasilannya. Petani seperti itu kemungkinan tidak akan melamar karena mereka sendiri menyadari ada persoalan nanti jika mereka ikutserta. Dengan demikian, sebaiknya adalah untuk menerima petani miskin yang melamar serta memahami biaya-biaya dan tugas-tugas yang diwajibkan dan tanggung jawab-tanggung jawab untuk ikutserta di proyek.

2. Saya mengakui sistem lotre tidak dapat dilaksanakan di semua lokasi sekarang ini, karena keterampilan mandor-mandor masih terbatas. Namun, sistem lotre itu sebaiknya selalu digunakan dilokasi-lokasi dimana petugas-petugas setempat sudah mendapat pelatihan. (Di salah satu lokasi riset saya, kekurangan keterampilan mandor bukanlah alasan untuk tidak melaksanakan pembagian andil menurut sistem lotre).

Saya menyarankan ide-ide yang berikut untuk mengatasi masalah kekurangan keterampilan dalam pelaksanaan pembagian andil: (1) pelatihan pemetaan lahan ("land survey") dan pelaksanaan lotre diadakan dalam training perhutanan sosial untuk asper, mantri, dll. (2) pelaksanaan pemetaan lahan ("land survey") dan lotre termasuk dalam tugas para PLPS.

Penanya : Jen Tatum

1. Bagaimana peranan organisasi sosial dalam proses seleksi dan distribusi andil ?
2. Apakah ada (atau jika tidak, apakah Anda merasa perlu) pengamatan terhadap struktur geografis penduduk sekitar hutan (yang terpilih dan yang tidak terpilih tetapi yang membutuhkan lahan andil) ?

Jawab : William Sunderlin

1. Hal itu masih belum diteliti secara mendalam di lokasi-lokasi yang saya teliti. Meskipun begitu, dapat dikatakan bahwa peranan organisasi sosial cukup penting. Misalnya, di salah satu lokasi, ada kasus "pilih kasih" yang terjadi. Hubungan-hubungan tetangga dan teman-teman rupanya ber-pengaruh dalam seleksi anggota walaupun tidak diperbolehkan. Lagi pula, "tokoh-tokoh masyarakat" sering diberikan kesempatan untuk ikutserta dalam proyek sekalipun mereka bukan orang miskin.

2. Saya kira struktur geografis tidak perlu dipertimbangkan dalam proses seleksi anggota. Benar, ada kecenderungan lebih banyak petani miskin tinggal di lereng bukit (misalnya). Tetapi petani-petani itu sebaiknya terpilih menurut keadaan ekonomis, keterampilan, dan prestasi mereka. Apabila faktor geografis masuk sebagai persyaratan dalam pemilihan peserta, mungkin akan menimbulkan kerusakan sumber alam setempat (misalnya, jika petani yang menggarap di lereng bukit diprioritaskan dalam seleksi, mungkin nanti ada lebih banyak pertanian di lereng bukit). Akan tetapi faktor geografis layak dipertimbangkan dalam penentuan letak pembukaan hutan yang akan dijadikan lokasi proyek.

Penanya : Y. Bayu K.

1. Apakah perbedaan proses seleksi peserta dan proses pembagian andil tersebut berpengaruh terhadap keragaan (performance) dari usaha pertanaman yang dilakukan peserta baik tanaman pokok maupun bukan tanaman pokok ?
2. Apakah sebenarnya faktor yang paling menentukan terjadinya perbedaan proses seleksi peserta dan proses pembagian andil tersebut, dan apakah faktor penentu tersebut dapat berpengaruh bagi pembinaan petani pasca-proyek ?

Jawab : William Sunderlin

1. Belum ada bukti statistis yang menunjukkan pengaruh itu, tetapi pasti ada pengaruh itu. Jelasnya proses seleksi dapat menentukan siapakah diantara para calon terpilih, dan kualitas

usaha tani serta tingkat pemeliharaan tanaman pokok bervariasi menurut keterampilan dan semangat petani-petani yang terpilih.

Misalnya kadang-kadang ada kelalaian dalam usaha tani atau dalam pemeliharaan tanaman pokok di suatu lokasi. Kelalaian itu mungkin terjadi karena peserta itu lebih mengandalkan sumber pendapatan di luar proyek. Mungkin petani itu adalah buruh atau petani yang lebih mampu dengan banyak lahan milik diluar proyek. Apabila proses seleksi tidak dikerjakan dengan baik, mungkin kelalaian itu terjadi.

Sama saja dengan proses pembagian andil. Misalnya, jika terjadi perebutan andil seperti di lokasi A, ada sebagian peserta yang mendapatkan andil yang terlalu kecil (atau kurang subur) dibandingkan dengan tenaga keluarganya. Apabila begitu, mungkin hal ini mengakibatkan kelalaian.

Tingkat pertumbuhan tanaman-tanaman dapat diteliti sebagai "dependent variable", tetapi sulit diteliti karena seharusnya dapat membedakan pengaruh-pengaruh alam dari pengaruh-pengaruh manusia dalam tingkat pertumbuhan tanaman-tanaman di proyek.

2. Berdasarkan pengamatan-pengamatan di empat lokasi yang diteliti, saya mengajukan hipotesis bahwa faktor-faktor yang paling menentukan perbedaan proses seleksi adalah kualitas lahan di proyek dan struktur politik setempat. Kelihatannya, apabila jumlah peminat kecil, (di lokasi yang kurang subur) proses seleksi peserta agak bebas, sedangkan di lokasi dengan banyak peminat prosesnya lebih seksama. Di lokasi yang berlahan subur, struktur politik setempat menentukan sistem yang akan digunakan untuk menguntungkan pemenang-pemenang dalam seleksi peserta.

Penanya : Satyawan Sunito

1. Apakah dapat lebih spesifik mengenai "pilih kasih".

2. Tidak menggunakan sistem "lotre" apakah ini suatu kebetulan ?
Penjelasan : tidak menggunakan "lotre" merugikan petani miskin. Struktur politik desa biasanya dikuasai oleh petani kaya. Pejabat-pejabat pemerintahan desa pengaruhnya besar dalam menentukan berbagai kebijakan.

Jawab : William Sunderlin

1. "Pilih Kasih" itu terjadi di lokasi B di Jawa Tengah. Sebagian besar keanggotaan proyek itu dialihkan dari keanggotaan proyek PS yang berada di sebelah pembukaan yang baru itu. Oleh karena luasan pembukaan baru lebih besar dibandingkan dengan lokasi yang lama, maka ada lahan kosong.

Para kepala KTH dan mandornya ditunjuk untuk menyeleksi peserta-peserta baru. Pada umumnya, mereka memilih tetangga mereka. Ada banyak orang di kawasan proyek yang mengeluh bahwa proses seleksi itu tidak adil.

2. Di salah satu lokasi yang saya teliti (lokasi D di Jawa Timur) struktur politik desa pasti berpengaruh dalam keputusan untuk tidak menggunakan sistem lotre. Di lokasi itu, sistem lotre itu tidak digunakan justru karena sistem lotre itu tidak sesuai dengan struktur politik setempat, yaitu struktur yang menguntungkan petani-petani kaya dan tokoh masyarakat.

Penanya : Tutut Sunarminto

1. Dengan data yang sudah terkumpul, dapatkah diduga/bagaimana dugaan tentang :

- (a) peserta dengan "kapasitas" apa yang berhasil
- (b) di lokasi mana yang kemungkinan memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat
- (c) pernyataan pada hal. 9 point 2 yaitu "mereka mungkin akan meninggalkan proyek". Masalah ketergantungan kepada hutan ini, apa yang menjadi penyebabnya, yaitu karena "hutan dalam proyek tidak memberikan hasil secara ekonomis yang memadai"?
- (d) kalau dapat, mohon dijelaskan keterikatan masyarakat di lokasi penelitian dengan hutannya, yaitu apakah erat secara budaya sehingga hubungan mereka dengan hutan tidak semata-mata karena tuntutan/imbalan ekonomi dari "hutan".

Jawab : William Sunderlin

1. Saya masih belum sanggup untuk memberikan jawaban yang pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Namun saya dapat memberikan jawaban-jawaban yang bersifat sementara dan teoritis.

(a) Lebih gampang menggambarkan peserta yang tidak berhasil. Kadang-kadang ada peserta yang tidak dapat melanjutkan usaha tani mereka karena mereka tidak sanggup untuk mengeluarkan biaya-biaya atau tenaga yang cukup untuk membuka atau memelihara andil mereka. Pada umumnya petani-petani ini adalah yang sangat miskin/kekurangan lahan. Kadang-kadang ada orang yang berminat untuk masuk tetapi tidak melamar atau tidak masuk karena mereka menyadari jumlah tenaga kerja yang diwajibkan untuk menggarap di proyek atau jadwal pekerjaan di proyek tidak sesuai dengan pola kerja di pekerjaan pokok mereka. Pada umumnya, orang seperti ini adalah orang tanpa lahan atau buruh.

(b) Seperti diatas, lebih gampang menggambarkan apa yang tidak berhasil. Ada kegagalan di lahan yang terlalu kurus. Apabila para petani tidak dapat menghasilkan cukup, mereka meninggalkan proyek. (Hal ini tergantung pada keadaan relatif antara lahannya di proyek dan lahannya di luar proyek). Makin lama makin penting ketersediaan jalur-jalur pemasaran untuk penghasilan proyek. hal ini karena dengan penutupan tajuk tanaman pokok, tanaman palawija sering akan diganti dengan tanaman yang dipasarkan ("cash crop").

(c) Dalam empat proyek yang saya teliti, kekurangan pendapatan dari lahan proyek adalah alasan yang paling sering disebut petani-petani yang meninggalkan proyek. (Selama ini, baru sebagian kecil saja yang meninggalkan proyek). Yang saya katakan dalam makalah saya adalah hipotesis saja. Yaitu, ada kemungkinan bahwa petani-petani yang lebih mampu sanggup untuk meninggalkan proyek karena proyek PS (dan lahan hutan pada umumnya) bukan sumber pendapatan pokok mereka.

(d) Benar. Keterikatan masyarakat di proyek-proyek yang diteliti tidak semata-mata karena imbalan ekonomi. Misalnya di lokasi di Jawa Timur, ada bahan bakar yang tersedia yang lebih murah dibandingkan dengan kayu reneck. Akan tetapi masyarakat di kawasan itu masih tetap menggunakan reneck karena kebiasaan duduk-duduk di sekitar api ("api-api").

Penanya : Rinekso Soekmadi

1. Apakah luasan andil untuk masing-masing pesanggem sudah cukup layak, terutama jika dikaitkan dengan standar/garis kemiskinan oleh Prof. Sajogyo ?

2. Di Jawa Barat (BKPH Parung Panjang, RPH Jagabaya, KPH Bogor), saya pernah menjumpai adanya praktek sewa andil bagi pesanggem. Tetapi setelah saya tanyakan kepada Aspernya, ternyata itu hanya berlaku untuk areal-areal yang terdapat kayu bakar (sebagai ganti rugi kayu bakar tersebut). Bagaimana dengan praktek penyewaan yang dilakukan di beberapa tempat yang diteliti, apakah digali juga faktor penyebabnya ?

Jawab : William Sunderlin

1. Menurut informasi yang saya peroleh dari pejabat Perum Perhutani, tujuan program PS bukan untuk menyediakan luasan lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, melainkan untuk saling melengkapi pendapatan yang didapatkan dari luar batas-batas proyek PS. Sasaran Perum Perhutani adalah untuk menyediakan andil seluas 1/4 hektar. Akibat tingkat permintaan lahan yang tinggi, luasan andil sering dikurangi dari patokan 1/4 hektar itu.

Saya masih belum sempat untuk menganalisa sebagian besar data yang telah terkumpul, jadi masih belum tahu sejauh mana andil-andil di empat lokasi studi kasus mencukupi kebutuhan dasar menurut standar/garis kemiskinan Prof. Sajogyo.

2. Penyewaan lahan di proyek PS terjadi hanya di satu lokasi yang saya teliti. Setahu saya, penyebabnya adalah keinginan oknum setempat untuk ikut mendapatkan keuntungan dari kekayaan lahan di pembukaan itu. (Lahannya di lokasi itu subur sekali). Ada di antaranya orang berpendapat bahwa mereka berhak untuk memperoleh sebagian kekayaan itu karena gaji mereka rendah sekali.

Penanya : Budi Kuncahyo

1. Indikator apa yang Saudara pergunakan dalam memberi nilai pemerataan sosial di suatu desa penelitian?
2. Apakah seandainya kegiatan perhutanan sosial hanya diperuntukkan buat rumah tangga yang sudah memiliki lahan, akan dapat menunjang upaya pemerataan sosial?
3. Apakah penelitian Saudara juga mengkaji (mempelajari) masalah produktivitas rumah tangga pada berbagai golongan? (Curahan waktu kerja rumah tangga pada berbagai jenis pekerjaan).

Jawab : William Sunderlin

1. Kesenjangan atau pemerataan di suatu desa di nilai melalui perhitungan kekayaan rumah tangga yang diteliti. Perhitungan itu berdasarkan informasi mengenai berbagai macam kekayaan seperti lahan milik, peternakan, nilai rumah, dll. Penilaian ini ditambah analisis pendapatan dan pengeluaran yang lengkap selama satu tahun. Standar garis kemiskinan Prof. Sajogyo akan dipakai juga.
2. Sebenarnya ada cukup banyak responden yang tidak mempunyai lahan yang menyatakan mereka tidak dapat berpartisipasi karena pola pekerjaan mereka sebagai buruh tidak cocok dengan pola pekerjaan PS. Meskipun begitu, semestinya lahan hutan disediakan untuk orang-orang tanpa lahan yang sanggup untuk bekerja di proyek-proyek PS. Di empat lokasi yang kami teliti justru orang yang tanpa lahan (atau kekurangan lahan) yang paling mengandalkan ketersediaan lahan hutan (baik PS maupun tumpangsari biasa).

Dengan demikian, saya kira PS tidak akan menunjang upaya pemerataan sosial jika hanya diperuntukkan buat rumah tangga yang sudah mempunyai lahan.

3. Data untuk analisa seperti yang Saudara gambarkan sudah dikumpulkan tetapi analisa itu masih belum dilakukan.

Penanya : Sopari

1. Minta penjelasan lebih lanjut tentang "pemerataan sosial" -- kaitannya dengan tujuan penelitian (no.1) membandingkan status sosek rumah tangga peserta dan bukan peserta.

Jawab : William Sunderlin

1. Apabila salah satu tujuan program PS adalah untuk mewujudkan pemerataan sosial dengan mengikutsertakan petani-petani yang miskin, maka semestinya ada tingkat keterlibatan petani miskin yang nyata. Tingkat keterlibatan yang nyata itu dapat dilihat melalui perbandingan status sosio-ekonomi peserta dan bukan peserta. (Yaitu, masyarakat bukan peserta merupakan standar untuk mengukur prestasi dalam usaha mencapai tujuan pemerataan sosial tersebut).

Penanya : Saharuddin

1. Kegagalan petani miskin untuk menjadi pesanggem karena dominasi petani kaya, akan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi. Padahal salah satu tujuan Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin. Pertimbangan apa yang menyebabkan gugurnya petani miskin dalam proses seleksi untuk masuk proyek? Padahal hasil seleksi diatas akan menipiskan dukungan mayoritas petani miskin sekitar hutan terhadap perhutanan sosial dari keberadaan hutan.

2. Apa ukuran keseimbangan luas lahan dengan jumlah petani yang berminat atau berapa luas lahan minimum yang harus digarap per jiwa sehingga dikatakan ada keseimbangan? Apakah keseimbangan yang ditemui dapat bertahan dalam jangka panjang?

Jawab : William Sunderlin

1. Kekurangan keterlibatan petani miskin terjadi terutama di dua lokasi (di antara empat) yang diteliti. Dua lokasi itu berlahan cukup subur. Dengan demikian ada persaingan di dua lokasi itu untuk menjadi peserta, dan ada jumlah yang nyata petani miskin yang kalah dalam persaingan itu.

Penyebab utama dalam kekalahan ini adalah kekurangan dalam proses melaksanakan seleksi peserta. Saya kira persoalan itu dapat diatasi, atau paling tidak dikurangi, melalui pelatihan untuk para petugas Perum Perhutani dalam proses seleksi peserta dan pembagian andil yang baik.

2. Tujuan Perum Perhutani adalah untuk menyediakan andil yang seluas 1/4 hektar untuk setiap peserta, tetapi sering peserta mendapatkan lebih sedikit dari 1/4 hektar akibat tekanan untuk menerima semua peminat dalam seleksi peserta. (Yaitu, luasan yang tertentu dibagi antara lebih banyak orang). Lagi pula, kadang-kadang andil dibagi dua dalam suatu keluarga. (Lihat diskusi dalam makalah). Tidak ada standar keseimbangan yang tertentu, karena tujuan dalam menyediakan 1/4 hektar bukan untuk mencukupi kebutuhan dasar. (Lihat jawaban 1, penanya: Rinekso Soekmadi).

Penanya : Jijen, Advisor Perhutanan Sosial, Bina Swadaya

Komentar

Dalam rangka pemilihan anggota KTH yaitu mengutamakan orang miskin sedikit mengalami kesulitan khususnya pada lahan yang keadaannya cukup kritis. Karena pada lahan kritis hasil dari palawija tidak menguntungkan sedangkan petani sendiri perlu biaya yang cukup besar untuk pengolahan tanah. Melihat keadaan tersebut perlu ditinjau kembali kriteria pemilihan lahan untuk PS kalau memang tujuan PS untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

SIDANG SEMINAR KEDUA